

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan sajian data dan analisis data yang telah dipaparkan peneliti pada Bab III, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan tentang pengelolaan isu Humas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanganan relokasi area parkir Malioboro pada tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pengelolaan isu relokasi area parkir Malioboro dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah perencanaan yang terdiri dari identifikasi isu yang dilakukan dalam bentuk *monitoring* media dan analisis isu yang dilakukan dalam bentuk diskusi media. Tahap kedua adalah pengorganisasian dilakukan dalam bentuk penentuan strategi perubahan isu. Bagian Hubungan Masyarakat menggunakan strategi dinamik dalam pengelolaan isu relokasi area parkir Malioboro. Tahap ketiga adalah pelaksanaan yang terdiri dari membangun komunikasi, pengembangan wacana, dan pendampingan media. Tahap terakhir adalah evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan rutin setiap bulan bersama Asisten Sekertaris Daerah dan Kepala SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi memiliki kesadaran untuk menjalin hubungan yang baik dengan media serta menjadikan media

sebagai mitra dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Inisiatif Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk melakukan diskusi dengan redaktur media dalam bentuk “konsultasi” menjadikan hubungan antara pemerintah dengan media semakin erat serta menjadikan media memiliki pemahaman yang utuh tentang esensi berjalannya kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada.

3. Pengelolaan isu relokasi area parkir Malioboro oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi dinilai berhasil. Pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro awalnya sempat mengalami penolakan dari para juru parkir, namun pada tanggal 4 April 2016 pelaksanaan relokasi area parkir dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya penolakan dari masyarakat secara umum. Hal ini dipengaruhi oleh hubungan baik Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi dengan media, baik di tingkat redaktur dan wartawan media (Bernas Jogja, Harian Jogja, Radar Jogja, dan Kedaulatan Rakyat) sehingga media dapat memahami pelaksanaan kebijakan tersebut dan pemberitaan yang dilakukan media dapat lebih objektif.
4. Faktor pendukung dalam pengelolaan isu relokasi area parkir Malioboro adalah hubungan baik yang dimiliki Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi dengan media lokal di Yogyakarta. Media memiliki kekuatan untuk menyebarkan informasi kepada publik yang luas serta dapat mempengaruhi perkembangan suatu opini publik sehingga pelaksanaan pengelolaan isu yang dilakukan dapat lebih efektif dengan melibatkan media. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pengelolaan isu yang dilakukan

Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi seperti membangun komunikasi, pengembangan wacana, dan pendampingan media.

5. Faktor penghambat dalam pengelolaan isu relokasi area parkir Malioboro adalah kurangnya kesadaran masyarakat sekitar Malioboro khususnya para juru parkir Malioboro tentang area trotoar sebagai area publik yang seharusnya digunakan oleh masyarakat umum untuk berjalan kaki atau melakukan berbagai aktivitas. Kesadaran juru parkir Malioboro yang kurang, menimbulkan anggapan bahwa pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai area publik dianggap sebagai tindakan pengusuran terhadap para juru parkir dari area aktivitas ekonomi yang sudah mereka lakukan sejak dulu.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi perlu meningkatkan komunikasi kepada masyarakat terdampak. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan koordinasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi dengan SKPD terkait (UPT Malioboro dan Dinas Pariwisata) sehingga setiap aspirasi masyarakat yang masuk ke SKPD dapat dengan cepat diterima dan menjadi bahan pertimbangan Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi dalam pengelolaan isu.

2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi perlu mengadakan pengawasan yang ketat kepada UPT Malioboro dan Dinas Pariwisata. Sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan masyarakat terdampak isu, UPT Malioboro dan Dinas Pariwisata diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap terkait masyarakat terdampak isu dan melakukan respon yang tepat untuk mencegah berkembangnya isu menjadi suatu krisis.
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi perlu mengembangkan strategi pengelolaan isu dengan membuat suatu *team* manajemen isu sehingga ketika muncul isu-isu potensial yang berdampak terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta dapat teridentifikasi dan dikelola lebih dini.
4. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi mengenai aktivitas pengelolaan isu suatu humas pemerintah dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran mengenai peran dan tugas humas pemerintah yang profesional dan terstruktur bagi humas pemerintah di kota lain.
5. Peneliti menyarankan penelitian selanjutnya untuk menggunakan prespektif atau sudut pandang yang berbeda, salah satunya dengan menggunakan metode kuantitatif. Prespektif ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pengelolaan isu yang telah dijalankan Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi.